

Judul : Pembebasan Pajak Pembelian Yacht Dorong Pariwisata
Tanggal : Sabtu, 31 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Pembebasan Pajak Pembelian Yacht Dorong Pariwisata

Fakir Miskin
... DARI HALAMAN 1

Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan itu sudah berlaku sejak Senin (26/7).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor ber alasan, industri pariwisata bahari perlu didorong. Sebab, industri ini merupakan salah satu sektor potensial untuk dikembangkan.

"Yacht yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata tetap dikenakan PPnBM dengan tarif 75 persen," katanya, kemarin.

Sebelum ini, Sri Mulyani juga sudah memberikan stimulus diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga 0 persen. Di antaranya, pajak

untuk pembelian mobil baru. Sri Mulyani ber alasan, diskon pajak itu untuk mendorong penjualan mobil sehingga roda ekonomi berjalan lagi.

Namun, bukan berarti Pemerintah tidak memikirkan wong cilik. Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, Sri Mulyani sudah menyiapkan Rp 6,1 triliun untuk bansos. Bansos dalam bentuk tunai diberikan ke 10 juta masyarakat tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.

Dalam penyaluran bansos tunai kali ini, Pemerintah menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran Januari-April 2021. Pada periode itu, targetnya memang 10 juta KPM, tetapi realisasinya hanya 9,6 juta KPM. Sehingga total anggaran dari Januari-April dan Juli-Agustus mencapai Rp 18,04 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani me-

nyambut positif relaksasi pajak pembelian kapal pesiar dan yacht. Dia yakin, kebijakan ini akan menggairahkan wisata bahari.

"Saya lihat yang dibebaskan hampir semua untuk keperluan negara. Tapi menarik, ada untuk pariwisata," ulasnya.

Menurutnya, kebijakan ini tentu bukan semata-mata untuk pengusaha. Dengan pembebasan ini, otomatis investasi yang dikeluarkan jadi lebih rendah. Efeknya, tarif yang dipatok bisa lebih murah. Artinya, bukan hanya pengusaha yang happy, tetapi juga masyarakat dalam hal ini wisatawan.

"Jangan seolah-olah dilihat yacht itu hanya orang-orang kaya. Ya, enggak gitu juga. Bisa dilihat kapal pinisi. Itu dipakai untuk disewakan. Kalau memang untuk keperluan pariwisata, sangat menolong ya. Harganya bisa jadi lebih kompetitif," terangnya.

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira

Dia menganggap, kebijakan itu tidak tepat di saat ketimpangan si kaya dan si miskin semakin melebar. Kata dia, di tengah pandemi ini, jumlah orang kaya naik 61,7 persen. Mereka seharusnya dikenakan pajak lebih tinggi.

Dengan kebijakan ini, dia khawatir penerimaan pajak makin berkurang. "Obrol insentif PPnBM juga menyasar kendaraan bermotor selain kapal pesiar. Bagaimana rasio pajaknya bisa naik kalau cara cara obrol insentif ke orang kaya terus berjalan?" kritiknya.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno ikut mengkritik. Kata dia, secara intuitif, pembebasan PPnBM merupakan tindakan yang mengusik keadilan. Terlebih di tengah pandemi yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi.

"Apalagi sebelumnya ramai wacana pengenaan pajak untuk beberapa jenis makanan dan jasa kesehatan. Pada waktunya kami akan meminta penjelasan yang tuntas," ucap politisi PDIP ini. ■ MEN